Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Sumatera Barat

Increased Women's Political Participation in the Regional House of Representatives in 2019 in West Sumatra

Atiqa Azza El Darman

Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang peningkatan jumlah partisipasi politik perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari tahun ke tahun di Sumatera Barat. Dengan adanya kebijakan afirmatif mendorong perempuan di Sumatera Barat agar dapat berpartisipasi dan berkompetisi dalam memperebutkan kursi di DPRD. Ketika Kebijakan Afirmatif muncul, maka terjadi peningkatan jumlah perempuan dalam DPRD di Sumatera Barat dari tahun ke tahun. Bahkan di Sumatera Barat jumlah partisipasi perempuan sudah melebihi batas minimum yaitu sebanyak 30%. Pada pemilu 2019 nantinya ada sebanyak 39,3 % perempuan di Sumatera Barat. Mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan dalam daftar bakal calon dan *zipper system*, harus tetap dipertahankan keberadaannya dalam UU Pemilu. Akan lebih efektif lagi bila ketentuan ini diikuti dengan adanya sanksi bagi parpol yang tidak menjalankannya.

Kata Kunci : Partisipasi, Politik, Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRACT

This article discusses the increasing number of women as legislative members in the Regional House of Representatives (DPRD) from year to year in West Sumatra. The existence of an affirmative policy encourages women in West Sumatra to participate in and compete for seats in the Regional House of Representatives. The emergence of Affirmative Policy increases the number of women's in the DPRD in West Sumatra from year to year. Even in West Sumatra, women's participation has exceeded the minimum limit of 30%. In the 2019 election there were 39.3% of DPRD women candidates in West Sumatra. Regarding 30% representation for women in the list of candidates and zipper system, their existence have to be stated in the Law on General Election. It would be even more effective if this regulation was followed by sanctions for political parties that did not implement it.

Keywords: *participation, politics, women, regional representatives*

A. Latar Belakang

Dalam penerapan desentralisasi, daerah otonom telah dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan menghasilkan otonomi daerah. Selama melakukan fungsi ini akan membutuhkan organisasi pemda yang dipercayakan kepada kepala daerah

dibantu perangkat daerah, dan DPRD. Eksistensi kedua perangkat diciptakan melalui seleksi, dan proses pemilihan diharapkan dapat membuka demokrasi di daerah, terutama bagi organisasi DPRD sebagai pelaksana fungsi kebutuhan politik.

Keanggotaannya dipilih berdasarkan karakteristik masyarakat, di mana wanita adalah bagian dari pemimpin. Tulisan ini mencoba meninjau peningkatan partisipasi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah hadir sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, 17 Agustus 1945, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Secara tegas hak perempuan untuk berpolitik dijamin dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau lebih dikenal dengan Konvensi Perempuan pada 24 Juli 1984. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada 29 Juli 1980 saat mengikuti Konferensi Perempuan se-Dunia ke II di Kopenhagen.

Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berbentuk proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Indonesia sebenarnya telah meratifikasi konvensi tentang hak-hak sipil dan politik, yang di dalamnya telah menjamin adanya dua hak demokratik yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for elections*). Tingkat representasi perempuan yang rendah di lembaga legislatif merupakan pelanggaran hak-hak demokratik fundamental perempuan, yang berarti hak-hak dasar mereka,

di antaranya; hak untuk mengungkapkan pendapat, hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan, dan hak pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik

Keterikatan perempuan dalam politik dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi dari pendapat dan proses kontrol, sehingga kebijakan yang dihasilkan akhirnya mendapatkan tempat mereka sendiri di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Dalam situasi ini, perempuan diberi kebebasan untuk bergabung dengan berbagai partai dan organisasi politik perempuan lainnya serta menyediakan ruang yang memadai untuk aspirasi. Akan tetapi, sering kali keterlibatan perempuan terbatas pada bidang yang sangat sempit, tidak ada kemerdekaan, dan tidak memiliki dampak langsung terhadap kebijakan publik. Namun begitu seringkali keterlibatan perempuan sangat terbatas pada area yang sangat sempit, tidak ada kemandirian, serta tidak memiliki dampak langsung dalam menghasilkan kebijakan publik. Fenomena peran perempuan tersebut dapat dilihat pada berbagai organisasi perempuan misalnya PKK dan Dharma Wanita (Rodiyah, 2008) yang sangat eksplisit dalam keterbatasan dan dependensi. Secara normatif, perempuan selayaknya mempunyai hak berpartisipasi dalam area publik yang lebih luas sehingga berupaya menampung semua aspirasi dan kepentingannya.

Partisipasi politik perempuan adalah aktivitas sukarela perempuan yang dikaitkan dengan komunitas gerakan perempuan politik. Ini terdiri dari berbagai bagian, termasuk kebenaran politik, aktivis perempuan, profesor, parlemen perempuan, kader partai politik perempuan, dan sebagainya, bahwa dalam hal ini mereka mendapatkan bagian dalam proses berkuasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Menurut

Myron Wiener, sifat partisipasi sukarela bukanlah paksaan, termasuk partisipasi perempuan politik oleh komunitas politik perempuan. Secara intrinsik adalah menggali dan memberdayakan potensi perempuan.

Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, hanya saja karena selama ini terjadi kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh produk-produk kebijakan yang bias gender, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan.

Perempuan perlu mengaktua lisasikan dirinya dengan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga politik (legislatif) maupun dalam kehidupan publik. Perempuan perlu menempati posisi dalam lembaga politik agar dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, karena kebijakan dan program yang disusun juga akan berlaku bagi perempuan. Semua kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga politik pada akhirnya akan menjangkau semua aspek kehidupan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, perempuan yang berjumlah lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia juga mempunyai hak untuk didengar suaranya dan mendapatkan manfaat dari proses pembangunan. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, namun partisipasi perempuan dalam kegiatan politik serta kesempatan dan kemampuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan menunjukkan peningkatan yang sangat lambat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan yang

lebih besar, representasi, dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna. Partisipasi dan representasi yang lebih adil sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga merupakan prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Demokrasi lebih memiliki makna jika memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, yakni kaum perempuan. Dengan demikian jika proses politik tanpa melibatkan perempuan, maka sudah pasti bukan merupakan demokrasi yang sesungguhnya.

Pada hakikatnya desas-desus peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia sudah ramai dibicarakan sejak akhir tahun 1998. Wacana tersebut makin berkembang di tahun 1999 ketika negeri ini, khususnya pemerintah dan partai politik yang ada, sibuk mempersiapkan pemilu. Pada saat itu untuk pertama kalinya isu mengenai hak-hak perempuan mulai dikedepankan sebagai tema kampanye. Hasil Pemilu 1999 menghasilkan Megawati Soekarnoputri (seorang perempuan) sebagai pemimpin yang paling populer yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mendapat suara terbesar. Namun secara kuantitatif, komposisi parlemen hasil Pemilu 1999 ini juga merupakan kemunduran, karena minimnya representasi perempuan (9%) (*www.dpr.go.id*).

Perempuan mengalami pasang surut dalam representasinya dalam dunia politik. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik mulai mendapatkan bagian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu No 12 tahun 2003, yang menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen adalah perempuan. Di Indonesia, peningkatan calon legislatif perempuan pasca reformasi mengalami peningkatan (Faqih, 2004). Masalah keterwakilan politik perempuan

adalah suatu hal yang sangat penting, khususnya dalam peristiwa penting dan besar seperti pemilu.

Salah satu penelitian tentang keterwakilan perempuan di antaranya menunjukkan bahwa tiga faktor utama yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga yang anggotanya dipilih adalah: 1. sistem pemilu; 2. peran dan organisasi partai-partai politik; 3. penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (*affirmative action*/aksi afirmatif atau diskriminasi positif) yang bersifat wajib atau sukarela. Salah satu bentuk *affirmative action* adalah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Ide inti di balik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar merupakan sedikit “tanda” dalam kehidupan politik.

Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau persentase dari anggota suatu badan, apakah itu suatu daftar kandidat (calon anggota legislatif/caleg), majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar perempuan, paling tidak, merupakan satu “minoritas kritis” (*critical minority*) yang terdiri dari 30% atau 40%. Satu hal yang penting adalah bahwa kuota ini hanya diterapkan sebagai tindakan temporer. Apabila hambatan struktural terhadap masuknya perempuan dalam politik telah dapat disingkirkan, maka kuota tidak perlu diterapkan lagi. Hal ini tidak terlepas dari dasar pertimbangan penerapan kuota itu sendiri, yaitu perempuan tertinggal jauh “start”-nya ketika memasuki dunia politik dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, kuota tidak diperlukan lagi ketika keduanya sudah berada pada garis *start* yang sama.

Sebagian besar kuota menggunakan angka 30%, karena angka 30% diyakini sebagai “angka kritis” (*critical number*) yang harus dicapai untuk memungkinkan sebuah perubahan. Angka 30% menunjukkan massa kritis (*critical mass*) yang akan memberikan dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Jumlah 30% ditetapkan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Pasal 27 UUD 1945 disebutkan bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan. Itu artinya, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi. Keterlibatan perempuan dalam proses Pemilu menjadi hal yang menarik, mengingat Undang-Undang telah mengakomodir 30% keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon legislatif. Keterwakilan 30% perempuan di parlemen diatur dalam UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Meskipun partai-partai politik berusaha memenuhi kuota 30% perempuan dari keseluruhan anggota calon legislatif yang mereka ajukan, namun mereka hanya menempatkan para calon legislatif perempuan tersebut di nomor-nomor urut yang besar.

Partisipasi perempuan dalam politik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif-terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2009. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%).

Peningkatan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam Pemilu, tersebut tidak terjadi secara serta merta, namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakandan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan. Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan.

Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Karena itu, UU paket politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang keharusan adanya partisipasi perempuan dalam politik sebanyak 30 % membuat di Sumatera Barat mengalami peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam DPRD tahun 2019. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Partisipasi Perempuan Dalam DPRD di Sumatera Barat Tahun 2014 dan 2019

DPRD	2014			2019		
	Pr	Jml	%	Pr	Jml	%
Sumatera Barat 1 (Kota Padang)	36	120	30,0	60	158	37,9
Sumatera Barat 2 (Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman)	36	84	42,9	41	96	42,7
Sumatera Barat 3 (Kab. Agam, Kota Bukittinggi)	35	93	37,6	47	117	40,2
Sumatera Barat 4 (Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat)	35	101	34,7	42	121	34,7
Sumatera Barat 5 (Kab. Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh)	25	72	34,7	29	79	36,7
Sumatera Barat 6 (Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang)	44	121	36,4	59	155	38,1
Sumatera Barat 7 (Kab. Solok, Kab Solok Selatan, Kota Solok)	35	83	42,2	45	105	42,8
Sumatera Barat 8 (Kab. Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai)	33	81	40,7	43	100	43
JUMLAH	279	755	36,9	366	931	39,3

Sumber: Hasil Data Olahan dari KPU Sumatera Barat (<http://sumbar.kpu.go.id/>)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan partisipasi perempuan dalam DPRD di Sumatera Barat, dari tahun 2009 bahkan ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak mengikutsertakan perempuan dalam kursi DPRD. Ini membuat kemajuan bahwa perempuan di Sumatera Barat mampu dalam memasuki dunia politik khususnya DPRD. Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji partisipasi, kualitas, dan tanggungjawab keterwakilan perempuan dalam politik. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang hendak diangkat dalam studi ini, antara lain adalah bagaimana Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 setelah dilaksanakannya kebijakan afirmatif di Sumatera Barat? Dan Bagaimana Strategi Komunikasi Politik yang digunakan dalam peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Sumatera Barat?

B. Studi Literatur

1. Kebijakan Afirmatif (*Affirmative action*)

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%." Dari waktu ke waktu, *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa: "Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)".

Pada kelembagaan partai politik pun, *affirmatif action* dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: "Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan". Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: "Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

Tidak cukup pada pendirian partai politik, *affirmative action* juga dilakukan pada semua tingkatan kepengurusan dari pusat hingga Kabupaten/Kota. Mengenai pelaksanaan dan teknisnya, diserahkan aturan masing-masing partai politik. Ketentuan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: "Kepengurusan Partai

Politik tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”. *Affirmative action* terhadap perempuan pada partai politik, tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja. Partai politik baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: “Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”.

Pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 UU Pemilu No 10 Tahun 2008 menyatakan: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Ketentuan lebih maju lagi dalam *affirmative action* adalah adanya penerapan *zipper system*. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap tiga bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang

perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan: “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.

Contoh dari penerapan *zipper system* tersebut, jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakan pada nomor urut 1, 2, atau 3 dan tidak di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7, misalnya, maka seorang perempuan harus diletakan di antara nomor urut 4 hingga 6. Lalu, sebagai salah satu penekanan lebih lanjut agar partai politik melaksanakan *affirmative action* terhadap bakal calon anggota legislatif tersebut, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk memberitahukannya kepada publik. Pada Pasal 66 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008 dinyatakan: “KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

2. Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi dapat diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat. Tanpa partisipasi, hampir semua orang akan dikuasai oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa.

Partisipasi politik menurut McClosky (1972:52) adalah kegiatan-

kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum. Miriam Budiarjo (1998) mendefinisikan partisipasi politik sebagai pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalurkan, atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*.

Menurut Rush (1997:124) menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: 1. Menduduki jabatan politik atau administrasi; 2. Mencari jabatan politik atau administrasi; 3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik; 4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik; 5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik; 6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik; 7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan lain sebagainya; 8. Partisipasi dalam diskusi politik informal; 9. *Voting* (pemberian suara); 10. Apatis total.

Menurut Nimmo (2000:47) keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor: 1. *Peluang resmi*, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena di dukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara; 2. *Sumber Daya Sosial*, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Dalam kenyatannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumberdaya sosial dan sumberdaya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan geografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin,

suku, tempat tinggal, agama, dll; 3. *Motivasi Personal*, artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak rasional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.

Partisipasi politik perempuan berdasarkan pengkategorian Milbarth terdiri atas: Apatis, yaitu tidak aktif, dan menarik diri dari proses politik; Spektator, yaitu pernah memilih dalam pemilihan umum; Gladiator, yaitu terlibat dalam proses politik, dan Pengeritik, yaitu dalam bentuk partisipasi tidak konvensional. Sedangkan menurut Olsen partisipasi politik termasuk di dalamnya perempuan yaitu: Pemimpin politik; Aktivistik politik; Komunikator; Warga negara biasa; Marginal dan Orang yang terisolasi .

3. Strategi Komunikasi Politik

Berdasarkan aturan perundang-undangan partisipasi politik perempuan sangat dilindungi bahkan diberikan kemudahan. UU Pemilu No.7 2017 telah mengisyaratkan adanya alokasi minimum sebesar 30% kepada perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Tuntutan UU berupa *affirmative action* yang memberi akses pada perempuan duduk di parlemen melalui pelaksanaan kuota minimum 30% tidak bisa dilepaskan dari strategi komunikasi.

Strategi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Poerwadarminta (1986) adalah siasat perang atau juga bisa dikatakan akal atau tipu muslihat untuk mencapai sesuatu. Sedangkan menurut M. Dahlan (1995:964) strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Definisi strategi yang memperlihatkan hubungan strategi dengan komunikasi politik dikemukakan oleh Effendy (1993:300). Menurutnya, strategi dapat diartikan sebagai suatu seni pendistribusian dan

penggunaan alat-alat (bisnis) untuk memenuhi hasil akhir sebuah kebijakan.

Selain itu, strategi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan seni dalam menghadapi dan mengkoordinasikan sumber daya sumber daya untuk mencapai tujuan. Strategi komunikasi dalam kaitan dengan partisipasi perempuan dan keterwakilan mereka di lembaga legislative bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu strategi komunikasi politik perempuan dan strategi komunikasi politik partai politik.

Strategi komunikasi perempuan dilakukan melalui counter komunikasi politik. *Counter* komunikasi politik ini tentu saja bukan hanya dilakukan oleh politisi perempuan tapi juga harus melibatkan politisi laki-laki. Upaya *counter* komunikasi politik yang pertama yang perlu dilakukan oleh perempuan adalah dengan pengarusutamaan gender (*gender mainstream*). Hal ini didasarkan pada Inpres No. 9 tahun 2000, yang mendorong perhatian masalah gender untuk semakin ditingkatkan Dengan pemahaman perspektif gender dan sensitif gender di kalangan pengambil kebijakan seperti badan eksekutif dan lembaga legislatif juga terus dikembangkan, sehingga berbagai kebijakan dan instrumen hukum yang berbasis kepentingan perempuan mulai terwujud.

Counter komunikasi politik yang kedua yaitu dengan mendorong *affirmative action*, sehingga amanat UU pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang keterwakilan perempuan minimal 30% itu direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Berbagai kegiatan bisa dilakukan oleh kaum perempuan, yaitu dengan mengadakan seminar, lokakarya, kajian ilmiah tentang *affirmative action*.

Counter komunikasi politik yang ketiga yaitu dengan melakukan pendidikan politik kepada perempuan. Upaya paling awal agar perempuan Siap berkompetisi di dunia publik tentu saja dengan

mencerdaskan kaum perempuan, sehingga mereka memiliki pengetahuan dasar tentang politik yang selanjutnya mereka bisa aktif sejajar dengan kaum laki-laki di dunia politik. Diantara cara melakukan pendidikan politik dari kalangan perempuan adalah dengan mendirikan berbagai organisasi khusus perempuan. Melalui organisasi ini kemudian perempuan diberi kesempatan untuk berkompetisi dengan sesama perempuan lainnya. Berbagai posisi strategis bisa diduduki oleh kalangan perempuan sehingga mereka terampil dan ahli dalam menyelesaikan masalah terkait posisi strategis manapun.

Strategi komunikasi yang bisa dibangun oleh partai politik adalah dengan menggunakan strategi pesan dan strategi media (Firmanzaal: 2007: 59). Strategi pesan ialah pengemasan pesan politik guna mengarahkan pemaknaan masyarakat terhadapnya. Pesan politik harus mampu membuka dan mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut tidak hanya berupa wacana, tetapi juga mengandung cara memecahkan persoalan. Ini berarti masalah keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislatif perlu dikemas oleh partai politik menjadi pesan yang menarik berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga masyarakat memperhatikan dengan baik.

Adapun partai politik membangun strategi komunikasi politik berupa kaderisasi pemberdayaan perempuan dan bauran *marketing*. Strategi pesan dilakukan partai politik melalui kaderisasi. Artinya, pesan politik banyak berisi ajakan agar perempuan semakin aktif dalam dunia politik seperti menjadi anggota partai. Selanjutnya, strategi yang dilakukan partai ialah melalui strategi media, yaitu sosialisasi perempuan dalam berbagai media termasuk dalam kepengurusan struktural, perempuan akan mampu tampil di dunia politik bila diberi kesempatan untuk menduduki posisi strategis dan kemudian juga diketahui oleh umum.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dalam DPRD Tahun 2019 setelah dilaksanakannya kebijakan afirmatif di Sumatera Barat

Penerapan *affirmative action* terhadap perempuan dalam politik dan Pemilu ternyata mampu meningkatkan partisipasi perempuan dari waktu ke waktu. Dari data tiga kali Pemilu terakhir, seperti yang telah dikemukakan di awal, keterwakilan perempuan terus meningkat seiring dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang menekankan perlunya *affirmative action* tersebut.

Peningkatan partisipasi politik perempuan yang lebih signifikan saat *zipper system* diberlakukan pada sistem

penetapan bakal calon anggota DPRD oleh partai politik. Di samping penerapan kuota perempuan 30%, bakal calon perempuan tersebut harus diletakan pada 1 (satu) di antara 3 (tiga) bakal calon. Peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD harus disertai dengan pengawalan dan perjuangan yang berperspektif gender yang berkelanjutan di dalam proses politik. Karena itu, Partai Demokrat dan fraksinya di DPRD perlu memiliki strategi untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Jumlah Perempuan di Kursi DPRD Sumatera Barat

Jenis Kelamin	1999	2004	2009	2014	2019
Perempuan	9,0%	11,8%	18,0%	36,9%	39,3%
Laki-Laki	91,0%	88,2%	82,0%	63,0%	60,7%
	<i>Tanpa Affirmative action</i>	<i>Dengan affirmative action kuota 30 % perempuan</i>	<i>Dengan affirmative action kuota 30 % dan zipper system 1 diantara 3 bakal calon</i>	<i>Dengan affirmative action kuota 30 % dan zipper system 1 diantara 3 bakal calon</i>	<i>Dengan affirmative action kuota 30 % dan zipper system 1 diantara 3 bakal calon</i>

Sumber: Hasil Data Olahan dari KPU Sumatera Barat (<http://sumbar.kpu.go.id/>)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ketika munculnya Kebijakan Afirmatif maka terjadi peningkatan jumlah kuota perempuan dalam DPRD di Sumatera Barat dari tahun ketahun. Bahkan di Sumatera Barat jumlah partisipasi perempuan sudah melebihi dari batas minimum yaitu sebanyak 30%. Pada pemilu 2019 nantinya ada sebanyak 39,3 % perempuan di Sumatera Barat yang

akan berkompetensi di dalam memperebutkan kursi DPRD di tingkat provinsi. Dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia perpolitikan dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki. Ini juga merupakan kesempatan bagi perempuan untuk membuat wadah dalam menuangkan aspirasi-aspirasinya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota merilis jumlah keterwakilan Perempuan pada masa Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Limapuluh Kota dalam pemilihan legislatif 2019 mendatang. Dalam data, jumlah perempuan yang ingin bertarung dalam Pileg 2019 ini meningkat sebanyak 4 persen dari 2014 silam. Namun dengan jumlah DCS keseluruhan yang juga meningkat, membuat peluang perwakilan perempuan semakin tipis. Pasalnya, pola perhitungan suara keterwakilan perempuan nantinya untuk duduk di DPRD disamakan dengan keterwakilan laki-laki. Ditambah lagi, jumlah bacaleg Laki-laki juga meningkat dari 251 orang ditahun 2014 menjadi 268 orang menjadi DCS di tahun 2019.

Dari data KPU Limapuluh Kota, jumlah DCT bacaleg laki-laki dan perempuan di tahun 2014 berjumlah 387 orang, terdiri dari 251 laki-laki dan 136 perempuan. Sedangkan DCS yang keluar di tahun 440 orang, masing-masing 268 laki-laki dan 172 perempuan. Persentase bacaleg perempuan tertinggi di tahun 2014 adalah perwakilan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan 42,9 persen. Ditahun 2019, yang tertinggi dari partai Parindo dengan 46,9 persen atau 15 orang bacaleg perempuan. Hal ini membuktikan di tahun 2019, antusias perempuan pada pileg 2019 kabupaten Limapuluh Kota meningkat.

Dengan 172 bacaleg perempuan, berarti sudah memenuhi kuota dari bacaleg keseluruhan yakni 39.1 persen dari 440 orang bacaleg. Dilihat tahun 2014 hanya 35,1 persen dari 387 orang caleg. KPU menyebutkan syarat kuota perempuan lebih 30 persen hanya sampai penetapan DCT. Tidak menjamin persentase jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota nantinya karena semuanya tergantung pilihan masyarakat. Kuota 30 persen hanya sampai ke DCT. Setelah itu dikembalikan ke masyarakat. Siapa yang akan duduk di

kursi parlemen. Cara perhitungan suara perempuan sama dengan laki-laki.

2. Strategi Komunikasi Politik yang digunakan dalam peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Sumatera Barat

Strategi Komunikasi dalam kaitan dengan partisipasi perempuan dan keterwakilan mereka di DPRD dapat dikelompokkan menjadi dua strategi yaitu strategi komunikasi politik perempuan dan strategi komunikasi politik partai politik.

a. Strategi Komunikasi Politik Perempuan

Strategi Komunikasi Politik yang digunakan Sumatera Barat dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan adalah menggunakan *counter* komunikasi. *Counter* komunikasi itu sendiri terbagi dalam 3 kelompok: yang pertama, Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki dapat memperoleh akses kepada, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, serta memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. *Counter* komunikasi yang kedua yaitu dengan mendorong *affirmative action*, sehingga amanat UU pemilu Nomor 20 tahun 2004 tentang keterwakilan perempuan minimal 30% itu direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Berbagai kegiatan bisa dilakukan oleh kaum perempuan, yaitu dengan mengadakan seminar, lokakarya, kajian ilmiah tentang *affirmative action*. Di Sumatera Barat sendiri sudah mengadakan seminar-seminar yang berhubungan dengan kebijakan *affirmative* sehingga perempuan-perempuan di Sumatera Barat dapat menuntut hak dalam berpolitik. Hal ini yang membuat terjadinya peningkatan partisipasi politik perempuan pada DPRD tahun 2019 di Sumatera Barat. *Counter*

komunikasi yang ketiga adalah dengan melakukan pendidikan politik kepada perempuan. Pendidikan politik perempuan melalui organisasi mendorong mereka untuk semakin aktif ikut serta di dalam berbagai kegiatan yang sifatnya publik. Perempuan bisa tampil lebih terbuka dan mampu menyuarakan aspirasinya berkaitan dengan berbagai isu sosial kemasyarakatan.

Hambatan-hambatan psikologis dieliminasi sedemikian rupa, sehingga para aktivis muda perempuan bermunculan. Dari sini kemudian muncul bertambahnya aktivis politik perempuan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun, pendidikan politik tidak cukup dari organisasi keperempuanan saja, dibutuhkan pula kegiatan-kegiatan khusus yang sifatnya insidental untuk menambah wawasan dan keahlian kaum perempuan, misalnya melalui kegiatan-kegiatan ilmiah. Seminar, diskusi, simposium, atau pelatihan kepemimpinan adalah kegiatan-kegiatan berguna yang dapat menjadi *counter* komunikasi politik.

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut perempuan akan memiliki kemampuan untuk memiliki wawasan berpolitik yang lebih luas dan lebih baik. Mereka akan terasah dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan dan siap terjun karena memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan kaum laki-laki.

Pendidikan politik juga bisa dilakukan melalui *civic education*, atau pendidikan kewarganegaraan, yang berisi tentang pendidikan hak-hak politik perempuan, dan hak-hak sipil mereka yang selama ini terabaikan. Ini dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau forum-forum ilmiah lainnya yang menyebarluaskan nilai-nilai egaliter, dan kemandirian dalam kehidupan sosial pada institusi formal maupun nonformal yang kemudian mendorong perempuan untuk tampil percaya diri di panggung politik.

Penanggung jawab pendidikan politik bagi kaum perempuan ini, apalagi dikaitkan dengan pemenuhan kuota minimum 30% perempuan di parlemen selain kaum perempuan tentu saja adalah partai politik. Partai politiklah yang seharusnya paling terdepan dalam mendidik kaum perempuan sehingga mereka mampu tampil dan aktif di dunia politik. Hal ini terutama berupa pembukaan akses yang lebih luas dengan mendistribusikan perempuan dalam posisi-posisi strategis di organisasi.

b. Strategi komunikasi politik partai politik.

Strategi komunikasi yang bisa dibangun oleh partai politik adalah dengan menggunakan strategi pesan dan strategi media. Strategi pesan adalah pengemasan pesan politik untuk mengarahkan pemaknaan masyarakat terhadapnya. Pesan politik harus mampu membuka dan mengungkapkan tentang masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Pesan tersebut juga tidak hanya merupakan wacana, tetapi juga mengandung cara memecahkan. Ini berarti masalah keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislatif perlu dikemas oleh partai politik menjadi pesan yang menarik berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga masyarakat memerhatikan dengan baik. Adapun partai politik membangun strategi komunikasi politik berupa kaderisasi, pemberdayaan perempuan dan bauran marketing.

Strategi pesan dilakukan partai politik melalui kaderisasi. Artinya, pesan-pesan politik banyak berisi ajakan agar perempuan semakin aktif dalam dunia politik seperti menjadi anggota partai. Strategi yang dilakukan partai adalah dengan menggunakan strategi media, yaitu melalui sosialisasi perempuan dalam berbagai media termasuk dalam kepengurusan struktural. Perempuan akan mampu tampil di dunia politik bila diberi kesempatan untuk menduduki posisi strategis dan kemudian juga

diketahui oleh umum. Sedangkan strategi komunikasi politik partai berkaitan dengan marketing politik yaitu *marketing mix* (bauran marketing) yang terdiri dari: *Product* (produk), *Promotion* (promosi), *Price* (harga), dan *Place* (penempatan). *Product* yang dilakukan oleh partai politiknya adalah dengan mempersiapkan politisi perempuan yang berkualitas dan dikenal di masyarakat untuk dijadikan caleg. Karakteristik personal dari politisi perempuan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pengaruh dari patronclient seperti keluarga atau suami. Semua faktor tersebut menjadi nilai tambah bagi politisi perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik.

Sedangkan Promosi (*promotion*) dilakukan dengan cara mengaktifkan para politisi perempuan dalam berbagai kegiatan. Di masyarakat, caleg perempuan juga dipublikasikan secara gencar melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti diaktifkan dalam kegiatan keagamaan, majelis taklim, atau kegiatan ibu-ibu. *Price* (harga) yang berarti persiapan daya dukung ekonomi untuk meloloskan politisi perempuan menjadi anggota legislatif. Kebutuhan dana yang besar biasanya harus ada untuk melakukan aktivitas politik terutama kampanye dan proses penentuan internal caleg di parpol. Dengan dukungan dana partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di legislatif semakin didorong. Adapun Penempatan (*place*), artinya penempatan arti politisi perempuan sebagai caleg dengan ditempatkan pada posisi yang strategis, yaitu di urutan nomor jadi di bagian paling pertama atau kedua.

Sedangkan strategi komunikasi politik partai politik dilakukan melalui media. Strategi ini dilakukan dengan pemilihan media yang sesuai untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Media tidak selamanya sebagai

saluran yang selalu menggambarkan perempuan secara negatif. Media juga mampu mengangkat posisi perempuan sederajat dengan laki-laki bila digunakan sebagai media strategi komunikasi. Penyampaian pesan politik melalui media sangat tepat menggunakan teori difusi inovasi.

D. Kesimpulan

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas gerakan perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam gerakan ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Di Sumatera Barat dari tahun ke tahun dengan selalu mempertahankan dan selalu menerapkan kebijakan Affirmative sehingga partisipasi politik perempuan pada DPRD selalu mengalami peningkatan. Bahkan saat ini ada di beberapa Kabupaten/Kota yang sudah melebihi batas minimum kuota yang telah ditentukan yaitu sebanyak 30%. Untuk Pileg tahun 2019 yang akan dilaksanakan bulan april 2019 nantinya ada sebanyak 39,3 % perempuan yang akan ikut berpartisipasi dalam memberebutkan kursi DPRD Sumatera Barat.

Hal demikian tentunya tidak terlepas dari beberapa strategi yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan salah satunya yaitu strategi komunikasi politik sehingga perempuan bisa maksimal berpartisipasi, termasuk mendapatkan perwakilan di legislatif yang sesuai dengan mereka di masyarakat.

E. Rekomendasi

Ketentuan mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan dalam kepengurusan parpol harus tetap ada dalam UU Pemilu. Ketentuan ini harus menjadisyarat mutlak bagi parpol yang akan mengikuti pemilu. Untuk menjamin efektivitasnya, ketentuan tersebut harus disertai dengan sanksi yang tegas. Parpol yang kepengurusannya tidak memenuhi keterwakilan 30% untuk perempuan dilarang ikut menjadi peserta pemilu. Demikian pula dengan ketentuan mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan dalam daftar bakal calon dan zipper system, harus tetap dipertahankan keberadaannya dalam UU Pemilu. Akan lebih efektif lagi bila ketentuan ini diikuti dengan adanya sanksi bagi parpol yang tidak menjalankannya, dalam hal ini KPU harus mengembalikan daftar calon yang tidak memenuhi ketentuan ini kepada parpol peserta pemilu, sehingga ada jaminan bahwa setiap parpol akan mentaati ketentuan ini.

Mengingat *affirmative action* yang diterapkan pada saat penyusunan daftar bakalcalon belum dapat menjamin caleg perempuan untuk terpilih, maka diperlukan komitmen parpol untuk menempatkan caleg perempuan pada daerah pemilihan yang potensial untuk dimenangkan partai tersebut. Akan lebih efektif lagi bila parpol peserta pemilu bersedia memberikan persentase tertentu dari kursi yang diperolehnya kepada caleg perempuan, sehingga ada jaminan bahwa caleg perempuan benar-benar terpilih, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara Amerika Latin seperti Argentina, Bolivia, Brasil, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Panama, Peru, dan Venezuela.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dahlan M. (1995). *Kamus Induk Istilah Ilmiah*. Surabaya: Target Press.
- Effendy Onong Uchjana. (1993). *Ilmu. Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fakih, Mansour. (2004). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Buku Obor.
- McClosky, H. (1972). *Political Participation: International Encyclopedia Of The Sosial Science*. New York: MacMillan company and The Free Press.
- Miriam Budiardjo. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Nimmo, D. (2000). *Political Communication and Public Opinion*. California: Goodyear Publishing Company.
- Rush dan Althoff. (1997). *Pengantar Sosial Politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sutinah. (2006). *Partisipasi Politik Perempuan*. Surabaya: Cakrawala Timur.

Jurnal

- Dessy Artina. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum*, 123-141.
- Isnaini Rodiyah. (2013). Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *JKMP*, 55-70.

- Lidya Victorya Pandiangan. (2017). Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik : Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik. *Jurnal Politik Muda*, 1-11.
- Loura Hardjaloka. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 403-430.
- Sri Warjiyati. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. *Al-daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 1-27.
- Zaenal Mukarom. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator*, 257-270.

Website

www.sumbar.kpu.go.id diakses pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 10.00 WIB

Utari Dwi Rahma S, 2018. "KPU : Keterwakilan Perempuan Pada DCS Limapuluh Kota Naik 4%". <https://www.covesia.com/archipelago/baca/58290/kpu-keterwakilan-perempuan-pada-dcs-limapuluh-kota-naik-4-persen> diakses pada tanggal 12 Maret 2019, pukul 11.00 WIB